SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Alokasi Perjalanan Dinas dan Makan Minum Dikurangi
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Tribun Jabar/Hal.5
Edisi	: Selasa, 13 November 2018

Alokasi Perjalanan Dinas dan Makan Minum Dikurangi ✓

BANDUNG, TRIBUN - APBD murni Kota Bandung tahun 2019 sebesar Rp 5,99 triliun menurun dratis dibandingkan APBD murni 2018 sebesar Rp 6,6 triliun.

Penurunan APBD murni karena pendapatan asli daerah menurun dipertanyakan fraksi-fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (12/11).

Seusai sidang, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan menjawab pertanyaan semua fraksi tentang alasan penurunan APBD murni 2019 termasuk pendapatan asli daerah.

"Saya akan rapat dan koordinasi untuk menjawab se-

mua fraksi," ujar Yana ketika ditanya wartawan tentang penurunan APBD, kemarin.

PLH Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan penurunan APBD tidak akan mempengaruhi pelayanan dasar masyarakat.

"Anggaran kesehatan dan pendidikan tidak berkurang. Alokasi sama dengan tahun 2018 sesuai UU untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan diatasi 10 persen" ucap Ema.

Menurut dia, yang dikurangi atau efisiensi adalah perjalanan dinas dan makan minum.

Pendapatan asli daerah seperti pajak restoran, hiburan,

dan hotel naik.

Yang mengalami penurunan hanya pajak reklame karena target di tahun 2018 terlalu tinggi dari potensi yang ada.

Ema mengatakan untuk pajak hotel yang semula Rp 295 miliar meningkat bisa menjadi Rp 310 miliar.

Untuk pajak restoran dari Rp 278 miliar bisa naik menjadi Rp 325 miliar dan hiburan dari Rp 85 miliar bisa dinaikan menjadi Rp 87,5 miliar.

Ema bersama jajarannya selain membahas APBD murni, juga APBD Perubahan mengalokasikan dana yang harus dibayar.

"Bensin untuk Dinas Kebakaran harus dialokasikan, dan dana bantuan untuk parpol yang semula dianggarkan Rp 850 per satu suara menjadi 1.500 per suara sehingga harus ada tambahan alokasi," ujar Ema.

Anggota DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi meminta agar pemkot dalam menyusun anggaran serius dan tepat waktu sehingga kasus penolakan oleh gubernur tidak terulang.

Menurut Folmer, selain terlambat penyusunan APBD Perubahan dan APBD murni, ada silpa Rp 800 miliar disebabkan ada efisien dan gagal lelang. **(tiah sm)**